PEMERINTAH PROVINSI BALI

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

RENCANA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

TAHUN 2022

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan Tahunan Daerah Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Semesta Berencana.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
(3) Perangkat Daerah melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
(2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
    a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
    b. Inspektorat Daerah Provinsi;
    c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
    d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi.
(3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 Oktober 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 47

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	7
2.2	Analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	25
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali	26
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	33
	3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
	3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi.....	40

3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali.....	59
	3.2.1 Tujuan	59
	3.2.2 Sasaran	60
3.3	Program dan Kegiatan.....	60
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	62
BAB V	P E N U T U P	66

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	7
TABEL 2	Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2020	8
TABEL 3	Target dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020	9
TABEL 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021.....	12
TABEL 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung.....	26
TABEL 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	28
TABEL 7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	32
TABEL 8	Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	40
TABEL 9	Strategi dan arah kebijakan RPJMD 2019-2023.....	50
TABEL 10	Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Tahun 2022.....	60
TABEL 11	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencananaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2022 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan alur perencanaan Badan Penghubung selaku salah satu SKPD di Pemprov Bali saat ini membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan.

Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelahaan kebijakan nasional.

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu OPD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan capaian Renstra Badan Penghubung, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali, program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Memuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang terdiri dari 2 (dua) Program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Bab V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali

Pada Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2019-2023. Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali 2019-2023, yaitu :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja
2. Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yaitu :

A. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

TABEL 1

CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA (setelah perubahan Renstra)

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2020	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	95	85,96	75	85.96	114,60%

1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		92.02			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		86.58			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		88.50			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		76.76			

B. Capaian Kinerja Program

Tabel 2

Target dan Capaian Kinerja ProgramTahun 2020

No	Program	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020
	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi potensi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	75	85.96

		Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		92.02
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		86.58
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		88.50
		Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		76.76

C. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3

Target dan Capaian Kinerja Anggaran
Tahun 2020

No	Uraian	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Kinerja Anggaran	7.802.451.832,51	7.518.627.643

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020

Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali. Dari 2 (dua) program tersebut mengakomodir 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, yaitu peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dilaksanakan adalah :

1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

Secara rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali sudah melampaui target Tahun 2020 yaitu 85.96.

Faktor-faktor penghambat.

Secara umum beberapa faktor penghambat adalah :

1) Sumber Daya Manusia belum memadai

   Secara kuantitas dan kualitas tenaga PNS maupun tenaga kontrak di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

2) Sarana dan Prasarana belum memadai

   Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan wisma dengan kondisi yang baik dan representatif, alat transportasi yang memadai, sarana promosi dan informasi berupa replika budaya dan seni, pamflet/brosur, VCD seni dan budaya.

3) Penetapan target pendapatan yang terlampau tinggi untuk PAD.

5) Jumlah kamar/wisma dan bangunan wisma yang dijual terlalu sedikit dan sudah tidak representatif sehingga tidak dapat bersaing dengan city hotel yang telah banyak dibangun di sekitar wisma

6) Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi seni budaya dan pembinaan umat bagi masyarakat Bali di Jakarta.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, perlu ditetapkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi dan informasi hasil pembangunan daerah Bali melalui pemeran kerajinan dan ekonomi serta pertunjukan/pagelaran-pagelaran kesenian.
3. Menurunkan target pendapatan PAD untuk tahun-tahun mendatang disesuaikan dengan realitas di lapangan
4. Melaksanakan pembangunan gedung kantor dan wisma yang baru sesuai dengan dokumen perencanaan (DED) yang telah dibuat.

Tabel 4 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Badan Penghubung									
4	11			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat									
	01	01		Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	80,16	80	(belum keluar nilai LKjIP)	-	82	-	-
	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayaninya jasa surat menyurat		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya air dan listrik	Terlayaninya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan		100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					kantor								
	01	01	04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya sarana penunjang kantor untuk administrasi kantor		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pencetakan blanko dan penggandaan		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan kantor menjadi baik		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktivitas kantor		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	08	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya rapat-rapat di Badan Penghubung		100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01	01	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	10	Upacara keagamaan	Tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan yang menunjang aktivitas kantor		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya sarana perlebgkapan kantor yang berdaya guna		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya sarana kantor yang terawat		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara optimal		100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01	01	20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang berdaya guna		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	24	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	dokumen perencanaan yang memadai		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	50	Penyediaan bahan logistik kantor	Terwujudnya bahan logistik kantor yang siap pakai		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	55	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran PBB, THR dan iuran tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	01	01	23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	tersedianya akses disabilitas di Anjungan Bali TMII		-	1 paket	1 paket	100%	-	-	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01	02		Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks kepuasan penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	95	83,92	75	85,96	114,61%	80	-	-
	01	02	01	Kegiatan Pagelaran Seni budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni		2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	seluruh anggaran dirasionalisasi	seluruh anggaran dirasionalisasi	2 kali kegiatan	-	-
	01	02	02	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya	Jumlah pembinaan masyarakat Bali di Jakarta		2 kali kegiatan	100 orang	50 orang	50%	100 orang	-	-
	01	02	03	Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah	Tersedianya kebutuhan operasional pimpinan		100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2021													
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
5	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	80,16	80	-	-	82	-	-
5	07	01	101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat						100%	57%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan						2 dokumen	2 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD						1 dokumen	1 dokumen	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan SKPD						1 dokumen	-	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD						1 dokumen	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan SKPD						1 dokumen	-	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 dokumen	1 dokumen	
5	07	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan						100%	56%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN						50 dokumen	30 dokumen	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi						12 dokumen	6 dokumen	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi						12 dokumen	6 dokumen	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan						1 dokumen	-	
5	07	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancarankantor						100%	81%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia						14 jenis	14 jenis	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang tersedia						3 jenis	3 jenis	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan jenis sesajen untuk upacara keagamaan						3 jenis	2 jenis	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan						7 jenis	6 jenis	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia						4 jenis	4 jenis	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi						12 bulan	6 bulan	
5	07	01	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah						100%	50%	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor						8 unit	4 unit	
5	07	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100%	98%	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia Jumlah penyediaan jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu						600 buah	600 buah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu						12 bulan	6 buah	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu						12 bulan	6 buah	
5	07	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah						100%	67%	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik						13 unit	13 unit	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik						12 bulan	6 bulan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik						12 bulan	6 bulan	
5	07	02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayananBadan Penghubung	95					80	89,71	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	07	02	101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	95					80	89,71	
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta						2 kali	1 kali	
				Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pelestarian seni budaya yang diselenggarakan						2 kali	1 kali	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung dilaksanakan dengan baik						12 bulan	6 bulan	

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN LAPORAN: Desember

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4.11.01.01.01.) Sumber Dana : DAU	5.000.000	4.991.000	0,15%	100,00	100,00	0	0,15	0,15	0	100,00	99,82	0,18	0,15	0,15	0	9.000
2	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (4.11.01.01.02.) Sumber Dana : DAU	185.200.000	145.226.524	5,53%	100,00	100,00	0	5,53	5,53	0	100,00	78,42	21,58	5,53	4,34	1,19	39.973.476
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (4.11.01.01.03.) Sumber Dana : DAU	369.667.912	368.982.088	11,04%	100,00	100,00	0	11,04	11,04	0	100,00	99,81	0,19	11,04	11,02	0,02	685.824
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Alat Tulis Kantor (4.11.01.01.04.) Sumber Dana : DAU	9.977.600	9.977.600	0,30%	100,00	100,00	0	0,30	0,30	0	100,00	100,00	0,00	0,30	0,30	0	0
5	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (4.11.01.01.05.) Sumber Dana : DAU	3.289.900	3.289.900	0,10%	100,00	100,00	0	0,10	0,10	0	100,00	100,00	0,00	0,10	0,10	0	0
6	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (4.11.01.01.06.) Sumber Dana : DAU	12.500.000	12.500.000	0,37%	100,00	100,00	0	0,37	0,37	0	100,00	100,00	0,00	0,37	0,37	0	0
7	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (4.11.01.01.07.) Sumber Dana : DAU	5.000.000	5.000.000	0,15%	100,00	100,00	0	0,15	0,15	0	100,00	100,00	0,00	0,15	0,15	0	0
8	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Makanan dan Minuman (4.11.01.01.08.) Sumber Dana : PKB	5.600.000	5.600.000	0,17%	100,00	100,00	0	0,17	0,17	0	100,00	100,00	0,00	0,17	0,17	0	0
9	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (4.11.01.01.09.) Sumber Dana : PKB	79.504.180	61.783.081	2,38%	100,00	100,00	0	2,38	2,38	0	100,00	77,71	22,29	2,38	1,85	0,53	17.721.099
10	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Upacara Keagamaan (4.11.01.01.10.) Sumber Dana : PKB	75.000.000	75.000.000	2,24%	100,00	100,00	0	2,24	2,24	0	100,00	100,00	0,00	2,24	2,24	0	0
11	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (4.11.01.01.12.) Sumber Dana : PKB	114.950.000	109.545.900	3,43%	100,00	100,00	0	3,43	3,43	0	100,00	95,30	4,70	3,43	3,27	0,16	5.404.100
12	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (4.11.01.01.16.) Sumber Dana : PKB	418.567.912	417.422.088	12,50%	100,00	100,00	0	12,50	12,50	0	100,00	99,73	0,27	12,50	12,47	0,03	1.145.824
13	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas (4.11.01.01.17.) Sumber Dana : PKB	799.492.632	797.162.444	23,88%	100,00	100,00	0	23,88	23,88	0	100,00	99,71	0,29	23,88	23,81	0,07	2.330.188

14	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (4.11.01.01.20.) Sumber Dana : PKB	18.100.000	18.090.000	0,54%	100,00	100,00	0	0,54	0,54	0	100,00	99,94	0,06	0,54	0,54	0	10.000
15	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (4.11.01.01.23.) Sumber Dana : PKB	151.500.000	150.565.675	4,53%	100,00	100,00	0	4,53	4,53	0	100,00	99,38	0,62	4,53	4,50	0,03	934.325
16	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (4.11.01.01.24.) Sumber Dana : PKB	8.199.800	8.199.800	0,24%	100,00	100,00	0	0,24	0,24	0	100,00	100,00	0,00	0,24	0,24	0	0
17	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (4.11.01.01.50.) Sumber Dana : PKB	5.000.000	5.000.000	0,15%	100,00	100,00	0	0,15	0,15	0	100,00	100,00	0,00	0,15	0,15	0	0
18	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (4.11.01.01.)	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (4.11.01.01.55.) Sumber Dana : PKB	73.400.000	65.658.675	2,19%	100,00	100,00	0	2,19	2,19	0	100,00	89,45	10,55	2,19	1,96	0,23	7.741.325
19	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah (4.11.01.02.)	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya (4.11.01.02.02.) Sumber Dana : DBH	49.459.600	49.459.600	1,48%	100,00	100,00	0	1,48	1,48	0	100,00	100,00	0,00	1,48	1,48	0	0
20	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah (4.11.01.02.)	Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah (4.11.01.02.03.) Sumber Dana : DBH	958.128.608	912.293.380	28,62%	100,00	100,00	0	28,62	28,62	0	100,00	95,22	4,78	28,62	27,25	1,37	45.835.228
TOTAL			3.347.538.144	3.225.747.755	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	96,36	3,64	100,00	96,36	3,64	121.790.389

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Dilihat dari Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020 terlihat bahwa realisasi fisik sudah terealisasi 100% dengan realisasi keuangan 96,36%, disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Mempermudah koordinasi pemerintahan daerah ke pusat
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta
4. Sebagai sarana promosi dan informasi budaya dan pariwisata Bali di Jakarta
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung.

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung dalam bentuk Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2019-2023 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta

Tabel 5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung (Setelah Perubahan Renstra)

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	70	75	80	90	83,92	85,96	89	90	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi :

Faktor Lingkungan *Internal*

A. Kekuatan *(Strenghts)*

1) Adanya perangkat hukum memadai antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 58

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2) Mempunyai sarana promosi di Anjungan Daerah Bali sebagai *show window* Bali tentang kesenian dan kebudayaan.

3) Adanya dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor (DED) sebagai dasar untuk pembangunan gedung kantor dan wisma Badan Penghubung yang baru dan lebih representatif.

B. Kelemahan *(Weaknesses)*

1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan alat transportasi yang memadai, sarana promosi dan informasi berupa replika budaya dan seni, pamflet/brosur, VCD seni dan budaya.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang *(Opportunities)*

1) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sewa wisma/penginapan dan sewa pemakaian kekayaan daerah berupa aula yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Bali

2) Badan Penghubung Provinsi Bali melalui Anjungan Daerah Bali sebagai media promosi seni dan budaya Bali di Jakarta

B. Ancaman *(Treats)*

1) Penetapan target yang terlampau tinggi untuk PAD.

2) Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sudah tidak representatif dalam menerima tamu karena jumlah kamar yang sedikit dan kurangnya kenyamanan disebabkan bangunan wisma yang sudah tua dan banyak kerusakan permanen.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Tabel 6 : Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan :	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan :	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat	100%	4,877,200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	4,877,200	

	Sub kegiatan :					Sub kegiatan :					
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	2 dok	4,877,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	2 dok	4,877,200	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	4,593,002,505	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	4,593,002,505	
b	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	4,593,002,505	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	4,593,002,505	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	154,557,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	154,557,700	
c	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis	14,652,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis	14,652,000	
d	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	20,633,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	20,633,200	
e	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2 jenis	80,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2 jenis	80,000,000	
f	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	6 jenis	7,132,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	6 jenis	7,132,500	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasidan konsultasi Jumlah penyediaan makanan dan minuman (nasikotak) untuk rapatrapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snackkotak) untuk rapat rapat	12 bulan	32,140,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasidan konsultasi Jumlah penyediaan makanan dan minuman (nasikotak) untuk rapatrapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snackkotak) untuk rapat rapat	12 bulan	32,140,000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	23,610,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	23,610,000	
h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	2 unit	23,610,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	2 unit	23,610,000	

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,049,692,636	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,049,692,636	
i	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	12 bulan 270 buah	12 bulan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	12 bulan 270 buah	12 bulan	6,000,000	
j	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	205,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	205,000,000	
k	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	838,692,636	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	838,692,636	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	874,462,348	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	874,462,348	
l	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara denganbaik	13 unit	754,521,376	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara denganbaik	13 unit	754,521,376	
m	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	35,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	35,000,000	
n	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	84,940,972	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	84,940,972	
B	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1,064,504,860	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1,064,504,860	
7	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1,064,504,860	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	1,064,504,860	
o	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	12 bulan	115,560,972	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	12 bulan	115,560,972	

p	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan	948,943,888	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan	948,943,888	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 23 Pebruari 2021 melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari stakeholder terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di Tahun 2022 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung yaitu fungsi sebagai pembantu pemerintah daerah dalam tugas koordinasi di Ibu Kota Jakarta dan sebagai *show window* kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Bali dan meningkatkan sarana promosi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Anjungan Daerah Bali TMII Jakarta. Adapun stakeholder Pemerintahan yang kami undang adalah Bappeda, Biro Umum dan Protokol, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Bapenda Provinsi Bali. Sedangkan stakeholder diluar pemerintah kami mengundang PHDI Pusat, Ketua Sarathi Banten, Ketua Pinandhita Sanggraha Nusantara, Ketua SDHD DKI Jakarta, unsur kepemudaan Hindu, perwakilan pimpinan sanggar se-Jabodetabek. Undangan di DKI Jakarta kami undang secara langsung sedangkan yang di Bali kami menyiapkan link untuk ikut menghadiri forum secara virtual. Ada banyak sekali masukan dan saran untuk Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2022.

Tabel 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pagelaran seni secara virtual	Jakarta	terlaksananya pagelaran seni secara virtual	1 kali	
2	Memaksimalkan akun media sosial Badan Penghubung Provinsi Bali dan bersinergi dengan mall pelayanan publik di DKI Jakarta untuk informasi kegiatan-kegiatan di Badan Penghubung	Jakarta	meningkatnya penyebaran informasi terkait kegiatan di Badan Penghubung	1 website Badan Penghubung 1 Instagram 1 Facebook	
3	Melakukan kerjasama dengan Binroh Hindu perusahaan-perusahaan swasta agar dapat melaksanakan kegiatan dari dana CSR dalam rangka pelestarian seni budaya	Jakarta	terlaksananya kegiatan pelestarian seni dan budaya kerjasama melalui CSR	1 kali	
4	Kegiatan untuk Pinandita dan Sarathi Banten dilaksanakan secara offline/tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat	Jakarta	Terlaksananya kegiatan gabungan Pinandita dan Sarathi Banten	1 kali	
5	Seminar sarathi banten bagi sarathi pemula	Jakarta	Terlaksananya kegiatan Seminar Sarathi Banten	1 kali	
6	Pelatihan keterampilan bagi Ibu-ibu WHDI DKI Jakarta	Jakarta	Terlaksananya pelatihan bagi Ibu-Ibu WHDI	1 kali	
7	Kuliner fair khas Bali yang halal	Jakarta	Terlaksanya kuliner fair	1 kali	
8	Renovasi Asrama Mahasiswa Bali di Jakarta agar lebih representative dan pendataan mahasiswa yang tinggal agar lebih jelas	Jakarta	Tersedianya asrama mahasiswa yang representative	1 paket	
9	Agar dapat menjadikan Anjungan Bali TMII sebagai pusat seni dan wadah bagi pemuda pemudi Bali untuk berkesenian	Jakarta	Anjungan Bali sebagai pusat seni budaya	rutin	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Renja SKPD dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2022 disusun mengacu pada sasaran pada Perda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2022.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan trasnformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka sasaran dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran :

a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia
2. Berkembangnya Kawasan Strategis berbasis industri dan pariwisata
3. Berkembangnya komoditas unggulan pendukung industri dan pariwisata
4. Berkembangnya kawasan perkotaan

5.Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi

6. Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal

7. Terpulihkannya daerah terdampak bencana

8. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata.

9. Berkembangnya kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah pengembangan industri, pariwisata dan investasi serta kawasan khusus lainnya.

10. Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera

2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

4. Pembangunan Wilayah Kalimantan

5. Pembangunan Wilayah Sulawesi

6. Pembangunan Wilayah Maluku

7. Pengembangan Wilayah Papua

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan

4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda

5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

6. Pengentasan Kemiskinan

7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran :

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengatahuan, inovatif dan kreatif

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran :

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Infrastruktur Ekonomi
3. Infrastruktur Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi Digital

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim

3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline

Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal
2. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri
3. Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
4. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional

Program Prioritas :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2019-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD 2019-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Provinsi Bali 2019-2023 kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Tabel 8

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali

Tahun 2019-2023

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap

layak				pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**	
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN				

KESEJAHTERAAN PETANI				
Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan local	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**	
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama		

		Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	

MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA			
Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI			
Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal

	kebudayaan Bali.	2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH			
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**	**STRATEGI**	
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN			
Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI			
Berkembangnya	1	Meningkatnya	1	Event, atraksi,

destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas		kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas		pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global			Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**	
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlidungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama

				ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI/TUJUAN	**SASARAN RPJMD**		**STRATEGI**	
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah

				tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 9

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali

Tahun 2019-2023

Strategi		Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali
7	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak

		huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)	
Strategi		**Arah Kebijakan**	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor	
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen	

	dalam arti luas	sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan	
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan eksport produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
Strategi		**Arah Kebijakan**	
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan kepemerintah pusat	

19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali
Strategi		**Arah Kebijakan**	
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali
		2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri

23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali	
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya	
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik	
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
		3	Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya
Strategi		**Arah Kebijakan**	
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas da fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan

			pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)
		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)
Strategi		**Arah Kebijakan**	
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	Event, atraksi, pertunjukan	Memberdayakan Event, atraksi,	

	kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata		pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi		Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali		Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata		Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata		Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali
Strategi		**Arah Kebijakan**	
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha

	menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor		rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia	
39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali	
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali	
41	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan	

Strategi		Arah Kebijakan	
42	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali	
43	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
44	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangunan dan pertumbuhan ekonomi Baru
45	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
46	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
47	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali ” melalui pola pembangunan semesta berencana, membangun Bali era baru. Ada 22 (dua puluh dua) misi untuk mewujudkan visi tersebut.

Badan Penghubung mengampu misi ke – 22 yaitu “MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH”.

Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, diantaranya :

Reformasi birokrasi, meliputi :

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsive)
2. Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, *reward dan punishment* dan systemmerit dalam birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali

Menunjuk pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023 maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

- Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

- Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

3.2.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 10 :

Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Target 2022
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (Enam belas) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG, dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

- Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubu

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Jumlah program yang direncanakan pada Renja Tahun 2022 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program dengan total 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (Enam belas) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 7,764,707,249,- (Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**								**7,764,707,249**					**9,634,578,472**
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6,700,202,389**					**7,934,578,472**
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,877,200**					**12,000,000**
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen perencanaan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	2 dokumen	100 %	4,877,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	12,000,000
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,593,002,505**					**4,983,578,472**
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	16 pns	100 %	4,593,002,505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	4,983,578,472
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154,557,700**					**330,000,000**
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	5 jenis	100 %	14,652,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	30,000,000
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	3 jenis	100 %	20,633,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	35,000,000
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	2 jenis	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	90,000,000
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	6 jenis	100 %	7,132,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasidan konsultasi Jumlah penyediaan makanan dan minuman (nasikotak) untuk rapat-rapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snackkotak) untuk rapat-rapat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	12 bulan 250 orang 150 orang	100 %	32,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	150,000,000
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**23,610,000**					**250,000,000**
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	10 unit	100 %	23,610,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	250,000,000
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,049,692,636**					**1,209,000,000**
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayartepat waktu Jumlah materai yang tersedia	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	12 bulan 270 buah	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	9,000,000
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang dibayar tepat waktu	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	12 bulan	100 %	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	300,000,000
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayartepat waktu	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	12 bulan	100 %	838,692,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	900,000,000
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**874,462,348**					**1,150,000,000**
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara denganbaik	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	13 unit	100 %	754,521,376	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	880,000,000
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	12 bulan	100 %	35,000,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	70,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai	12 bulan	100 %	84,940,972	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	200,000,000
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**								**1,064,504,860**					**1,700,000,000**
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**								**1,064,504,860**					**1,700,000,000**
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah kegiatan pagelaran seni Jumlah kegiatan pameran kuliner Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Nilai	3 kali 2 kali 12 bulan	90 nilai	115,560,972	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Nilai	500,000,000
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Nilai	12 bulan	90 nilai	948,943,888	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Nilai	1,200,000,000
												TOTAL	**7,764,707,249**					**9,634,578,472**

| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **7,764,707,249** | | | | | **9,634,578,472** |